

RINGKASAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum, sehingga akta yang dibuat olehnya merupakan akta otentik yang memiliki pembuktian yang kuat, salah satunya akta hibah hak atas tanah, walaupun akta hibah hak atas tanah sudah merupakan alat pembuktian yang kuat, namun ternyata dapat diajukan pembatalannya di Pengadilan, seperti dalam Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor.4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg.

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan akta hibah hak atas tanah yang telah dibuat oleh PPAT dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor.4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg, dan untuk menganalisis prosedur pengembalian hak atas tanah kepada pemberi hibah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tesis ini menggunakan sumber data sekunder dengan metode analisis data normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perjanjian Hibah yang sudah dituangkan didalam Akta PPAT kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor. 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg yang merupakan perjanjian obligatoir dan yang tertuang dalam akta PPAT tersebut secara materiil adalah tidak sah. Prosedur pengembalian obyek hibah kepada pemiliknya berdasarkan Pasal 45 PP No.24 Tahun 1997, setelah adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka salinan putusan itu dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Nasional untuk membalik nama sertifikat dari atas nama penerima hibah kepada penghibah kembali, apabila tidak berhasil dapat melalui gugatan ke PTUN untuk membatalkan sertifikat yang lama tersebut.

Kata kunci: Pembatalan akta hibah, Akta PPAT, Hak Atas Tanah

SUMMARY

The Land Deed Making Officer is a public official, so the deed made by him is an authentic deed that has strong proof, one of which is the land right grant deed, although the land right grant deed is already a strong evidentiary tool, but it turns out that its cancellation can be submitted to the Court, as in the Case of the Religious Court Decision Number.4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg.

The purpose of the research in this thesis is to analyze the judge's legal considerations in the cancellation of the land rights grant deed that has been made by PPAT in the Religious Court Decision Number.4396/Pdt.G/2019/PA. As well as, and to analyse the procedure for returning land rights to grantors. This study uses a normative juridical research method, with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. This thesis uses secondary data sources with qualitative normative data analysis methods.

The results of the study show that, the Grant Agreement that has been stated in the PPAT Deed in the case of the Religious Court Decision Number. 4396/Pdt.G/2019/PA. As an obligatoir agreement and contained in the PPAT deed materially invalid. The procedure for returning the object of the grant to the owner is based on Article 45 of Government Regulation No.24 of 1997, After the existence of a court decision that already has permanent legal force, a copy of the decision is used as a basis by the National Land Agency to reverse the name of the certificate from the name of the grantee to the grantor again, if it is unsuccessful, it can go through a lawsuit to the PTUN to cancel the old certificate.

Keywords: *Cancellation of grant deed, PPAT Deed, Land Rights*